

## *Application of Feminist Ethics in the Governance of a Migraine Women Worker Protection for the State of Indonesia*

**Yeni Fitri Fujiyanti**

Universitas Padjadjaran

**Dr. Muhamad Rizal, S.H., M.Hum.**

Universitas Padjadjaran

**Sari Usih Natari, STP., MM.**

Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: [yeni20001@mail.unpad.ac.id](mailto:yeni20001@mail.unpad.ac.id),  
[muhamad.rizal@unpad.ac.id](mailto:muhamad.rizal@unpad.ac.id), [sari@unpad.ac.id](mailto:sari@unpad.ac.id)

**Abstract.** *Migrant women are a group that is vulnerable to exploitation, discrimination and violations of human rights in the workplace. Feminist ethics emphasizes the importance of gender equality, social justice, and recognition of women's unique experiences in the context of work. World-scale female workers where there are several parties who provide assistance in the economic field for their families and the country, but on the other hand there is often an inability to connect with many people around them. Women play a significant role in Indonesian migrant work. They often work as domestic workers, nurses, factory workers, or in other sectors. In this context, the application of feminist ethics in the governance of the protection of Indonesian migrant workers can help the struggle for women's rights with migraines and improve fair working conditions, pay attention to the special risks faced by women with migraines, and ensure their participation in decision-making related to policies and programs. protection of migrant workers. It is hoped that the application of feminist ethics in the governance of the protection of Indonesian migrant workers will help positive changes in fighting for the rights of migrant women, increase awareness of gender issues among migrants, and ensure better protection for them. In order to apply feminist ethics in the governance of the protection of Indonesian migrant workers, it is also important to continue to provide education and training on migrant women's rights, sexual violence, gender equality, and gender awareness. By increasing understanding and awareness of these issues.*

**Keywords:** *Women markers, Application of Feminist Ethic, Protection of Indonesian Migrant Workers*

**Abstrak.** Perempuan migran merupakan kelompok yang rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di tempat kerja. Etika feminis menekankan pentingnya kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap pengalaman unik perempuan dalam konteks pekerjaan. Pekerja perempuan berskala dunia dimana ada beberapa pihak yang memberikan bantuan dalam bidang ekonomi bagi keluarga dan negaranya, akan tetapi disisi lain sering terjadi ketidakmampuan dalam koneksi banyak dengan beberapa orang di sekitarnya. Perempuan memainkan peran yang signifikan dalam pekerjaan migran indonesia. Mereka sering kali bekerja sebagai pekerja

rumah tangga, perawat, buruh pabrik, atau dalam sektor lainnya. Dalam konteks ini, penerapan etika feminis dalam tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dapat membantu perjuangan hak-hak perempuan migran dan meningkatkan kondisi kerja yang adil, memperhatikan risiko khusus yang dihadapi oleh perempuan migran, dan memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program perlindungan pekerja migran. Diharapkan bahwa penerapan etika feminis dalam tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia akan membantu perubahan positif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan migran, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dalam migran, dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dalam rangka menerapkan etika feminis dalam tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia, penting juga terus mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak perempuan migran, kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan kesadaran gender. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu tersebut.

**Kata kunci:** Pekerja perempuan, Penerapan etika feminis, perlindungan pekerja migran Indonesia

## **LATAR BELAKANG**

Penerapan etika feminis dalam membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. Di era globalisasi ini, migrasi pekerja menjadi fenomena yang semakin umum terjadi, termasuk migrasi pekerja perempuan. Namun, pekerja perempuan migran seringkali menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang berbeda dengan pekerja migran laki-laki. Oleh karena itu, penting bagi negara Indonesia untuk memiliki tata kelola yang adil dan beretika dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan migran.

Etika feminis menawarkan perspektif yang kritis terhadap kesetaraan gender dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pekerjaan. Penerapan etika feminis dalam perlindungan pekerja perempuan migran dapat membantu memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi.

Perempuan menjadi terpinggirkan yang ingin menjadi tenaga kerja wanita TKW seringkali menjadi kelompok yang terpapar berbagai tindakan yang seringkali merugikan perempuan memiliki keterampilan rendah memilih meuan. Menjadi pekerja migran sering sekali menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai tindakan yang seringkali merugikan selalu menghadapi beberapa kekerasan fisik maupun non fisik di lingkungan kerja, kondisi kerja yang buruk, upah yang rendah dan tidak ada asuransi sosial dan kesehatan dalam kondisi yang ditentukan. Seringkali terjadi kejadian yang dialami TKI di negara tempat mereka bekerja menjadi sebuah bukti nyata bahwa TKI dianiaya sebagai budak dan dieksploitasi hingga diintimidasi.

Pekerja perempuan Perempuan seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan, dan ketidaksetaraan gender di sepanjang sejarah. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap persepsi bahwa perempuan adalah manusia lemah diantaranya yaitu :

1. sistem patriarki : sejarah umat manusia telah didominasi oleh sistem patriarki dimana kekuasaan dan kontrol diperoleh oleh pria. Sistem ini menghasilkan ketimpangan kekuasaan dan perlakuan yang merugikan terhadap perempuan, merugikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
2. pembagian kerja berdasarkan gender : Dalam banyak masyarakat tradisional, peran perempuan seringkali terbatas pada pekerjaan rumah tangga, perawat anak dan kegiatan domestik lainnya, sementara pria lebih sering terlibat dalam pekerjaan publik dan ekonomi. Pembagian kerja yang berbasis gender ini telah memperkuat persepsi bahwa perempuan adalah manusia lemah karena kontribusi mereka dianggap kurang berharga.
3. Penindasan dan kekerasan, termasuk kekerasan domestik, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan praktik - praktik lainnya.

Dalam upaya modern, semakin banyak upaya dilakukan untuk menghapus diskriminasi gender dan mempromosikan kesetaraan. Hal ini termasuk perjuangan untuk pemberdayaan perempuan, perubahan sosial, pengakuan terhadap hak-hak perempuan, dan penolakan terhadap stereotip negatif seperti persepsi perempuan sebagai manusia lemah.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian filsafat yang membahas Penerapan etika feminis dalam membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif dari sebuah wawasan penerapan etika feminis merupakan seorang tokoh Simone De Beauvoir (1906-1986) dalam sebuah buku karyanya mengatakan bahwa situasi yang tidak setara antara seorang perempuan dan laki-laki. Hubungan yang menindas ini berasal dae.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu melalui pendekatan ilmu pengetahuan sosial dan melakukan studi literatur melakukan tinjauan pustaka tentang topik ini untuk mengumpulkan penelitian dan kajian terdahulu yang telah dilakukan. melakukan analisis kebijakan dan regulasi yang ada terkait dengan perlindungan pekerja perempuan migraine di indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana aspek etika feminis tercermin dalam kebijakan tersebut

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Etika Feminis**

Perempuan memainkan peran yang signifikan dalam pekerjaan migran di indonesia. Mereka sering kali bekerja sebagai pekerja rumah tangga, perawat, buruh pabrik, atau dalam sektor lainnya. Dalam konteks ini, membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. dapat membantu memperkuat Penerapan etika feminis dalam membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif kan hak-hak perempuan migran dan meningkatkan kondisi kerja mereka.

Penerapan etika feminis dalam membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif membutuhkan beberapa aspek penting. Pertama, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran memperhatikan bahwa kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran memperhatikan dan mengatasi kesenjangan gender yang ada. Misalnya, memberikan perlindungan yang dihadapi perempuan migran, dan menghapus praktik-praktik yang mendiskriminasi perempuan.

Kedua, etika feminis menekankan pada pentingnya mengakui, menghormati, dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan migran secara khusus. Hal ini melibatkan melindungi hak-hak dasar mereka, seperti hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, akses layanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual. ketiga, etika feminis juga menyoroti pentingnya inklusi dan partisipasi perempuan migran dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Perempuan migran harus diberdayakan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, mengekspresikan kekhawatiran, dan menyumbangkan

perspektif mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan program yang memengaruhi hidup mereka.

Selain itu, etika feminis menekankan pada pentingnya memperhatikan isu-isu struktural yang mendasari ketidakadilan gender dalam migrasi dan pekerja migran. Ini mencakup menyadari dan mengatasi ketimpangan kekuasaan, diskriminasi sistemik, dan ketidaksetaraan sosial yang dapat mempengaruhi pengalaman dan kondisi kerja perempuan migran.

Penerapan etika feminis dalam membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. Dan juga harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program perlindungan pekerja migran mencerminkan nilai-nilai feminis dan memperjuangkan hak-hak perempuan migran secara efektif.

Penerapan etika feminis dalam membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif, penting juga untuk terus mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak perempuan migran, kekerasan gender, kesetaraan, dan kesadaran gender. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu tersebut, hal ini dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan migran di Indonesia.

## **2. Perlindungan pekerja migran**

Tata kelola perlindungan pekerja migran di Indonesia mengacu pada kerangka kebijakan, regulasi, dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan kepentingan pekerja migran di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek tata kelola perlindungan pekerja migran di Indonesia:

- A. Kebijakan perlindungan pekerja migran: Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan pekerja migran, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Kebijakan-kebijakan ini mencakup aspek-aspek seperti pendaftaran, rekrutmen, pelatihan, kontrak kerja, upah, hak-hak sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

- B. Badan dan lembaga terkait: Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai badan dan lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan pekerja migran, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Badan dan lembaga ini bertugas mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan memberikan layanan serta perlindungan kepada pekerja migran.
- C. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum: Ada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran. Hal ini melibatkan inspeksi kerja, pemantauan terhadap agen perekrutan tenaga kerja, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, perekrut, atau pihak-pihak terkait lainnya.
- D. Kerja sama bilateral dan multilateral: Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara tujuan migrasi, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan pekerja migran. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, peningkatan kesadaran, pembuatan perjanjian bilateral mengenai perlindungan pekerja migran, serta upaya kolaboratif dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pekerja migran.
- E. Pendidikan dan pelatihan :
- Pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Ini meliputi pelatihan keterampilan, peningkatan kesadaran tentang hak - hak pekerja migran, bahasa asing, dan pengetahuan tentang kondisi kerja dan kehidupan di negara tujuan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat mempersiapkan pekerja migran untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan etika feminis dalam membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. Di era globalisasi ini, migrasi pekerja menjadi fenomena yang semakin umum terjadi, termasuk migrasi pekerja perempuan. Namun, pekerja perempuan migran seringkali menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang berbeda dengan pekerja migran laki-laki. Oleh karena itu, penting bagi negara Indonesia untuk memiliki tata kelola yang adil dan beretika dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan migran. Perempuan memainkan peran yang signifikan dalam pekerjaan migran di Indonesia. Mereka sering kali bekerja sebagai pekerja rumah tangga, perawat, buruh pabrik, atau dalam sektor lainnya. Dalam konteks ini, Penerapan etika feminis dalam membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif dapat membantu memperjuangkan hak-hak perempuan migran dan meningkatkan kondisi kerja mereka. Untuk menerapkan Penerapan etika feminis dalam dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu tersebut, hal ini dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan migran di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Wuryandari, R. D. (2022). Perempuan Dan Penerapan Etika Feminis Dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.11>
- Susiana, S. (2019). Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207–222